



Integrasi Nilai SDGS dan Pancasila: Strategi Indonesia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah

Zahira Nandhifa Syifarany¹, Fawnia Azalia Sekar Parahita², Febby Cipta³,
Moh Hardy Yulinar Firdaus⁴, Nauval Dzikri Gofari⁵
Universitas Komputer Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: febbycipta28@gmail.com

Diterima: 21-01-2026 | Disetujui: 01-02-2026 | Diterbitkan: 03-02-2026

ABSTRACT

This study aims to examine how Indonesia is implementing the Pancasila economic system to help accomplish the Sustainable Development Goals (SDGs) at the national and regional levels. It uses a descriptive qualitative technique to look at both external and internal issues, such as global economic conditions, maritime security, human resources, natural resources, sociocultural dynamics, politics, and government functions. Regional case studies of the Pancasila economic system's implementation in Maluku Province, Papua Province, Sukabumi Regency, and Sulawesi Island are also included in the study. The results show that inclusive and fair economic development has been reinforced throughout areas by the application of Pancasila values, such as social justice and cooperation. The productive-age population makes up 70.7% of the population while the agricultural sector provides 12.53% of GDP, according to Statistics Indonesia (BPS, 2025). Persistent inequality is highlighted by a Gini value of 0.375. According to the study's findings, the Pancasila economic system and the SDGs may work together to promote inclusive, socially just, and sustainable national growth.

Keywords: Demographic Bonus, Indonesia, Pancasila Economic System, Regional Economic System, SDGs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis faktor internal dan eksternal, termasuk kondisi ekonomi global, keamanan maritim, sumber daya manusia, sumber daya alam, dinamika sosial budaya, struktur politik, serta peran pemerintah. Studi ini juga mencakup analisis studi kasus penerapan sistem ekonomi Pancasila di Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Kabupaten Sukabumi, dan Pulau Sulawesi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan gotong royong, mendorong pembangunan ekonomi berkeadilan di beberapa tempat. Menurut data BPS (2025), tenaga kerja produktif mencapai 70,7% dan sektor pertanian masih berkontribusi 12,53% terhadap PDB. Namun, ketimpangan pendapatan (Gini ratio 0,375) masih menjadi masalah. Studi ini menemukan bahwa jika sistem ekonomi Pancasila dan SDGs bekerja sama, pembangunan yang berkeadilan sosial, inklusif, dan berkelanjutan dapat dihasilkan.

Kata Kunci: Bonus Demografi, Indonesia, SDGs, Sistem Ekonomi di Daerah, Sistem Ekonomi Pancasila.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syifarany, Z. N., Parahita, F. A. S., Cipta, F., Firdaus, M. H. Y., & Gofari, N. D. (2026). Integrasi Nilai SDGS dan Pancasila: Strategi Indonesia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 2905-2913. <https://doi.org/10.63822/kmahf660>

PENDAHULUAN

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, arah pembangunan global mengalami perubahan mendasar menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. SDGs tidak hanya menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global menyatakan komitmennya untuk mencapai 17 tujuan SDGs hingga tahun 2030, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu (UNDP, 2023).

Dalam konteks nasional, implementasi SDGs tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa menempatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemanusiaan sebagai tujuan utama pembangunan nasional, sehingga secara konseptual memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip SDGs.

Landasan konstitusional pembangunan ekonomi Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sistem perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, serta mengedepankan semangat gotong royong dan pemerataan hasil pembangunan. Karakteristik ini membedakan sistem ekonomi Pancasila dari kapitalisme yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas, maupun sosialisme yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam seluruh aktivitas ekonomi (Hatta, 1956; Mubyarto, 1981).

Meskipun secara normatif sistem ekonomi Pancasila dirancang untuk berpihak kepada rakyat, realitas pembangunan ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Ketimpangan pendapatan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah masih menjadi persoalan utama. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 18,75%, sementara sektor pertanian sebesar 12,53%, yang mengindikasikan dominasi sektor primer dan industri menengah dengan nilai tambah terbatas.

Selain itu, kesenjangan ekonomi antarwilayah dan kelompok sosial masih cukup signifikan. Gini Ratio Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375 (BPS, 2025), mencerminkan distribusi pendapatan yang belum merata. Tantangan internal ini diperparah oleh dinamika eksternal, seperti konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik Iran–Israel pada tahun 2024. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas perdagangan global, harga energi, dan ketahanan ekonomi nasional (World Bank, 2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan inovasi ekonomi global membuka peluang baru bagi peningkatan efisiensi ekonomi serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan (OECD, 2024). SDGs, khususnya Tujuan ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Prinsip ini memiliki keterkaitan erat dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketimpangan

spasial yang cukup tajam. Wilayah barat Indonesia cenderung lebih maju dibandingkan wilayah timur, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, maupun tingkat kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan SDGs. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap relevansi dan efektivitas sistem ekonomi Pancasila dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini didasarkan pada gagasan bahwa nilai-nilai Pancasila dan agenda global SDGs harus diintegrasikan secara utuh dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional. SDGs berfungsi sebagai panduan teknis dan operasional dalam perencanaan pembangunan, sementara Pancasila berperan sebagai landasan moral dan ideologis yang mengarahkan kebijakan ekonomi agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip keadilan sosial, gotong royong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat menjadi pembeda utama sistem ekonomi Pancasila dibandingkan sistem ekonomi lainnya.

Secara konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 mempertegas peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional Indonesia menempatkan negara sebagai pengendali dan pengarah pembangunan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Integrasi peran ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tingkat daerah, integrasi nilai-nilai Pancasila dan SDGs dapat diwujudkan melalui kebijakan ekonomi lokal yang mendorong partisipasi masyarakat, penguatan potensi lokal, dan pelestarian lingkungan. Prinsip “tidak ada yang tertinggal” dalam SDGs sejalan dengan sila kelima Pancasila, yang menuntut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dalam proses desentralisasi, sehingga kebijakan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan antarwilayah dan penguatan solidaritas nasional.

Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan praktik baik dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Di Jawa Tengah, pengembangan desa wisata berkelanjutan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan potensi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, pengembangan ekonomi maritim berbasis komunitas mencerminkan penerapan nilai gotong royong dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi lokal. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur di masing-masing daerah.

Ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hambatan geografis, keterbatasan akses transportasi, serta rendahnya konektivitas digital menjadi faktor utama yang menghambat inklusivitas ekonomi. Kondisi ini mempertegas urgensi untuk mengkaji kembali sistem ekonomi nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan Pancasila dan SDGs.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji relevansi sistem ekonomi Pancasila dalam menghadapi dinamika ekonomi global serta perannya dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Pendekatan ini penting agar pembangunan nasional tidak hanya mengejar pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan, dan kemandirian nasional secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara Sistem Ekonomi Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena ekonomi, sosial, dan politik secara komprehensif melalui analisis data empiris, dokumen resmi, serta kajian akademik yang relevan (Sugiyono, 2019).

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara Sistem Ekonomi Pancasila, implementasi SDGs, dan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan, sehingga tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dianggap paling tepat untuk memahami dinamika tersebut secara kontekstual.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memotret kondisi ekonomi melalui data dan indikator, tetapi juga menggali makna, nilai ideologis, dan dimensi moral yang melekat dalam Sistem Ekonomi Pancasila (Creswell, 2018). Tujuan penelitian ini bukan sekadar menyajikan angka-angka statistik, melainkan memahami sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih relevan dan berperan dalam kebijakan ekonomi kontemporer Indonesia.

Dalam analisisnya, penelitian ini mempertimbangkan faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, kekayaan sumber daya alam, kondisi sosial budaya, stabilitas politik, serta peran pemerintah. Selain itu, faktor eksternal seperti perkembangan teknologi global, dinamika ekonomi dunia, dan isu keamanan maritim juga dianalisis untuk menggambarkan realitas empiris pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk melihat posisi strategis Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

Selain pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-institusional sebagai landasan teoritis. Pendekatan ini menempatkan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar ideologis dan moral dalam menganalisis arah kebijakan ekonomi nasional. Melalui pendekatan ini, hubungan antara struktur kelembagaan negara dan implementasi kebijakan ekonomi dalam mendukung agenda SDGs dapat dipahami secara lebih sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai literatur akademik, dokumen resmi, dan data statistik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data sekunder nasional, yang mencakup data makroekonomi, sektor unggulan, ketenagakerjaan, inflasi, serta laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.
2. Data global, yang bersumber dari laporan lembaga internasional seperti UNDP (2023), World Bank (2024), IMF (2025), dan OECD (2024), khususnya terkait indikator pembangunan berkelanjutan, perdagangan global, dan stabilitas ekonomi internasional.

3. Literatur akademik, berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas ekonomi kelembagaan, pembangunan berkelanjutan, serta Sistem Ekonomi Pancasila.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data dari berbagai sumber untuk memfokuskan analisis pada isu-isu utama, seperti implementasi SDGs, peran Pancasila dalam kebijakan ekonomi, serta pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perekonomian Indonesia. Kedua, penyajian data, di mana hasil reduksi disusun dalam bentuk narasi analitis, tabel, atau bagan tematik guna memperlihatkan keterkaitan antarvariabel, misalnya hubungan antara bonus demografi dan peluang pertumbuhan ekonomi, atau antara stabilitas perdagangan dan ketegangan geopolitik. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian berdasarkan teori Sistem Ekonomi Pancasila dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta membandingkan data dari berbagai sumber resmi untuk menjaga konsistensi analisis.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik data empiris, tidak hanya sebatas menyajikan tren statistik. Sebagai bagian dari analisis empiris, penelitian ini juga mengkaji beberapa studi kasus daerah yang dianggap representatif, yaitu Provinsi Maluku, Papua, Kabupaten Sukabumi, dan Pulau Sulawesi. Maluku dan Papua dipilih karena mencerminkan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan. Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai contoh daerah dengan tantangan infrastruktur dan aksesibilitas yang berdampak pada keterlambatan distribusi manfaat pembangunan, meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Sementara itu, Pulau Sulawesi mencerminkan persoalan ketimpangan pendapatan antarwilayah yang membutuhkan kebijakan pembangunan berbasis gotong royong dan kemandirian ekonomi daerah.

Pendekatan multi-kasus ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana integrasi nilai-nilai Pancasila dan agenda SDGs dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi di tingkat daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan nasional.

Sebagai pelengkap, analisis SWOT digunakan untuk menilai posisi strategis Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan kekuatan berupa kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan stabilitas politik; kelemahan berupa ketimpangan pendapatan dan rendahnya produktivitas sumber daya manusia; peluang dari ekonomi hijau, digitalisasi, dan integrasi regional ASEAN; serta ancaman yang berasal dari konflik geopolitik, fluktuasi harga energi global, dan isu keamanan maritim.

Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data ekonomi nasional dari BPS (2025), laporan kebijakan pembangunan dari Bappenas (2024), serta indikator global yang diterbitkan oleh World Bank (2024) dan UNDP (2023). Dengan cara ini, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sistem ekonomi Pancasila memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Data Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia

Integrasi Nilai SDGS dan Pancasila: Strategi Indonesia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah

(Syifarany, et al.)

pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen, dengan sektor industri pengolahan dan pertanian sebagai penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri pengolahan berkontribusi sebesar 18,9 persen, sementara sektor pertanian menyumbang 12,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, yang di satu sisi membuka peluang besar, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan SDGs, khususnya terkait pekerjaan layak dan pola produksi yang berkelanjutan.

Dari sisi sumber daya manusia, Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi, di mana lebih dari 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Potensi ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan inovasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih berada pada angka 73,6, sementara tingkat ketimpangan pendapatan tercermin dari rasio Gini sebesar 0,375. Kondisi ini menandakan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata, sehingga menjadi tantangan dalam pencapaian SDGs yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas dan pengurangan kesenjangan sosial.

Secara sosial dan budaya, Indonesia memiliki modal penting berupa nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang masih kuat. Nilai ini sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam aspek politik, stabilitas nasional juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan World Governance Indicators (World Bank, 2024), tingkat stabilitas politik Indonesia relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembangunan jangka panjang secara lebih konsisten.

Selain faktor internal, dinamika eksternal turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik global, seperti konflik Iran–Israel dan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berdampak pada fluktuasi harga energi dan gangguan rantai pasok internasional. Kenaikan harga minyak dunia hingga sekitar US\$92 per barel pada awal 2025 mendorong inflasi domestik sebelum akhirnya dapat dikendalikan melalui kebijakan subsidi energi. Di sisi lain, isu keamanan di sekitar Selat Malaka juga menjadi perhatian, mengingat jalur ini merupakan salah satu nadi utama perdagangan Indonesia, dengan sekitar 40 persen aktivitas ekspor-impor melewatinya. Gangguan di kawasan ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap stabilitas perdagangan nasional.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui transformasi digital dan pengembangan ekonomi hijau. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB telah mencapai 18,6 persen dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor teknologi dan keuangan digital. Selain itu, komitmen terhadap transisi energi bersih dan hilirisasi sumber daya mineral mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek energi bersih, inovasi industri, dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan analisis SWOT, posisi Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan cukup strategis. Kekuatan utama terletak pada kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, serta budaya gotong royong yang memperkuat kohesi sosial. Namun, kelemahan berupa ketimpangan wilayah dan belum meratanya kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu

segera ditangani. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui perkembangan teknologi digital, ekonomi hijau, dan potensi ekonomi maritim, meskipun tetap dihadapkan pada ancaman ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka ideologis sekaligus praktis dalam implementasi SDGs di Indonesia. Dengan memadukan mekanisme pasar yang efisien dan prinsip keadilan sosial, sistem ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan cita-cita Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Sistem Ekonomi Pancasila memiliki relevansi yang kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi Indonesia menuju keadilan sosial dan keberlanjutan. Pancasila sebagai dasar ideologi negara memberikan landasan moral dan sosial yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin pemerataan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Sistem ekonomi Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, menempatkan negara sebagai pengatur utama cabang-cabang produksi strategis dan pengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan SDGs, khususnya tujuan mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan ketimpangan, dan konsumsi serta produksi yang berkelanjutan. Nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pencapaian SDGs melalui bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan stabilitas politik. Namun, tantangan struktural seperti ketimpangan kualitas sumber daya manusia, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta ketidakmerataan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, tekanan eksternal berupa konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, dan gangguan rantai pasok global turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, arah pembangunan Indonesia menunjukkan kemajuan melalui kebijakan hilirisasi sumber daya, pengembangan ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Studi kasus seperti Program Dana Desa membuktikan bahwa kebijakan berbasis pemerataan memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal, meskipun hasilnya masih bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuntut keseimbangan antara efisiensi pasar, peran aktif pemerintah, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan untuk memperkuat integrasi antara SDGs dan Sistem Ekonomi Pancasila. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas melalui pendidikan vokasional, penguatan literasi digital, dan kewirausahaan. Kedua, pengelolaan sumber daya alam perlu diarahkan pada hilirisasi, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ketiga, penguatan ekonomi digital dan ekonomi hijau perlu dipercepat melalui digitalisasi UMKM, pengembangan energi terbarukan, dan

inovasi berbasis potensi lokal. Keempat, pemerataan infrastruktur fisik dan digital harus dipercepat guna mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya di wilayah tertinggal dan kepulauan. Kelima, tata kelola program ekonomi seperti Dana Desa perlu diperkuat melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk menjaga stabilitas rantai pasok, keamanan maritim, dan ketahanan energi nasional.

Dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan normatif dan SDGs sebagai panduan operasional, Indonesia memiliki kerangka yang kuat untuk membangun sistem ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi keduanya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hatta, M. (1956). *Demokrasi kita*. Balai Pustaka.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1981). *Ekonomi Pancasila*. BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- ASEAN Secretariat. (2024). *Regional maritime security and trade outlook*. ASEAN Studies Centre.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025*. BPS.
- International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook 2025*. IMF.
- OECD. (2024a). *Economic outlook for Southeast Asia, China, and India 2024*. OECD Development Centre.
- OECD. (2024b). *Green growth and sustainable development*. OECD Publishing.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report: Advancing sustainable development*. UNDP.
- World Bank. (2024). *Global economic prospects 2024*. World Bank Group.
- World Bank. (2024). *World governance indicators*. World Bank Group.
- Bappenas. (2024). *Indonesia's sustainable development goals dashboard*. Kementerian PPN/Bappenas.
- OECD Development Centre. (2024). *Economic outlook data portal*. OECD.